

**PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPMd) DI KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh :

Raisa Betsaida Hutabarat

Email : Hutabaratraisa@gmail.com

Pembimbing : **Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

PNPM Rural poverty is a program that has been implemented since 2007. Implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas village District has been done since 1998. Issues raised is how the National Programme Implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas in Village District of Siak Hulu Regency of Kamparin 2015 based on the timeliness and accuracy of the cos. This research aims to identity and analysis the implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas in Village District of Siak Hulu Regency of Kampar. This is a descriptive qualitative study which gives a clear and detailed illustration based on the facts was found in the observation.

Theory used in this study principles of management from Terry in Manullang (2012:8) and theory empowerment by Mardikanto dan Soebiato(2015:126) interpretes the factors that affect one is success or failure in the implementation of the National Program Community Empowerment in Rural Areas Village District of Siak Hulu Regency of Kampar in the collections data use observation and interview technique qualitative. Technique analysis is descriptive qualitative.

After research had been done we found that implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas In Village District of Siak Hulu Regency of Kampar well and eased the burden Siak Hulu district every year. Also there are problem are face in running the implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas that are human resources lack of public awareness and undiscipline of time in practice it.

Keyword: The Implementation, National program for Community Empowerment in Rural Areas.

A. PENDAHULUAN

PNPM Mandiri adalah salah satu program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan

masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah: Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM

Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di kecamatan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi pemerintah, fasilitator, konsultan pendamping, masyarakat baik pusat maupun daerah (BKAD).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan dilanjutkan berdasarkan surat keputusan menteri No.414.2./675/PMD Tahun 2007.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen atau sektor dan pemerintah daerah. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sasaran dari program ini adalah masyarakat dikecamatan yang tergolong miskin dalam pembangunan berkelanjutan. kriteria masyarakat penerima bantuan adalah:

1. Kepala keluarga yang kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya keluarganya dan mengembangkan usaha untuk kesejahteraan.
2. Pendapatan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan minimum atau sehari harinya
3. Rendahnya Pendapatan yang disebabkan oleh sarana dan prasarana fisik akibat kelangkaan modal.
4. Masyarakat miskin yang cacat dan tidak memiliki Pendapatan tetap.

Peminjaman kepada masyarakat miskin yang tidak diberikan syarat agunan membuat pengelola hanya dapat meminjamkan dana kepada mereka yang dikenalsaja sementara mereka yang tidak dikenal tidak dapat diberikan pinjaman. Hal ini dikarenakan mereka yang tidak dikenal oleh pengelola tersebut tidak diketahuikarakteristiknya, pengelola takut jika nantinya dana yang diberikan kepada mereka yang tidak dikenal pengelola tanpa agunan tersebut akan membawa lari dana tersebut dan pengelola menjadi rugi. Namun dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam terdapat beberapa permasalahan yang timbul diantaranya tidak tepatnya sasaran yaitu masyarakat miskin. Tingginya minat masyarakat alam melakukan pinjaman dana. Selain itu banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran.

Dari pedoman PNPM Mandiri terlihat bahwa sasaran utama adalah miskin, padahal kenyataannya pemberiandana kepada masyarakat miskin memang masih terjadi pemilihan

atas orang-orang yang menerima dana tersebut yakni hanya orang-orang yang dikenal oleh pengelola saja yang diberikan pinjaman.

PNPM Mandiri perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

PNPM Mandiri Perdesaan Merupakan suatu fase perubahan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Perjalanan fase PNPM Mandiri Perdesaan adalah: tahun 1996 sebagai pilot Proyek, tahun 1998-2002 PPK Tahap I, tahun 2002-2005 PPK Tahap II, tahun 2005-2007 PPK Tahap III, tahun 2007 PNPM PPK, dan tahun 2008 sampai sekarang PNPM Mandiri Perdesaan, ditandai dengan peluncuran program oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Landasan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan,

4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Nomor : 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 4142/3717/PMD tanggal 5 November 2007 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam implementasinya, jenis kegiatan yang dibiayai melalui PNPM Mandiri perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana atau sarana dasar. kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin ataupun rumah tangga miskin. Kegiatan ini berupa kegiatan semenisasi jalan, pembagunan drainase, atau kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
2. Kegiatan keterampilan kelompok usaha ekonomi.
3. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan., yaitu kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri yaitu berupa pemberian bantuan biaya

bagi pelajar sekolah dasar (SD) yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin. Pemberian bantuan biaya pendidikan diharapkan mampu meningkatkan prestasi pelajar yang mendapat bantuan biaya pendidikan tersebut, pada bidang kesehatan yaitu kegiatan pemberian imunisasi pada balita-balita agar ketahanan tubuh balita tetap terjaga.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peranan pemerintah lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah peneliti menarik untuk meneliti dengan judul tentang “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dikecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”

Konsep Teori

1. Manajemen

Robin dan Coulter dalam **Wibowo (2014:1)** mengatakan manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Efisiensi menunjukkan hubungan antara input dan output dengan mencari sumber daya minimum, sedangkan efektif menunjukkan makna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut **Siswanto (2005:7)**, mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

Yahya (2006:2) sebagai seni, manajemen adalah manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan, yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama untuk mencapai tujuan dan lebih bermanfaat. Praktek manajemen seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip teori. Manajemen bukan hanya sebagai ilmu dan seni, tetapi merupakan kombinasi keduanya.

Terry (2006:4) dalam teorinya menyatakan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang dilakukan untuk menentukan saran-saran yang telah

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Menurut **Terry**, dalam **Manullang (2014:3)**, prinsip-prinsip manajemen adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (planning)

Fungsi perencanaan merupakan suatu kegiatan dimana didalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki.

b. Pengorganisasian (organizing)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, menegompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Didalam suatu organisasi terdapat beberapa unsur yaitu: adanya perincian kerja, penempatan, dan pembagian tugas.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Setelah perencanaan dan pengorganisasian selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam manajemen adalah mewujudkan rencana tersebut dengan mengnakan organisasi yang terbentuk. Menurut **Badrudin (2015:152)** dalam **Lily sarvini** Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan atau pengerak merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Sehingga diperlukan adanya kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi dalam pelaksanaannya.

d. Pengawasan (controlling)

Menurut **Terry** dalam **Manullang (2012:8)**, pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaanya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian.

2. Program

Sujianto (2008:32)

mendefenisikan Program adalah suatu komplek dari tujuan-tujuan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu.

Menurut **Umar (2005:15)**

program atau program-program disusun dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Program pada hakikatnya adalah kumpulan proyek, dalam hal ini proyek bisa disamakan dengan program.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integritas untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

3. Kemiskinan

Sunyoto (2010:125) Ada tiga macam konsep kemiskinan yaitu, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif.

a. Konsep kemiskinan absolut

Dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret yaitu pada kebutuhan dasar minimum masyarakat (sandang, pangan, dan papan). Dimana asing-masing negara memiliki batasan

kemiskinan absolut yang berbeda-beda, sebab kebutuhan masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukuran kemiskinan ini dipastikan sehingga memiliki garis batas kemiskinan. Konsep kemiskinan ini banyak memperoleh kritik, yang mengatakan tidak mungkin membuat satu ukuran untuk semua anggota masyarakat. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan dimasyarakat daerah berbeda-beda. Contohnya kebutuhan masyarakat perdesaan berbeda dengan masyarakat perkotaan, dan juga antara desa pertanian dan desa nelayan. Meskipun demikian konsep ini sangat populer karena sering digunakan dalam pengentasan kemiskinan.

b. Konsep kemiskinan relatif yaitu konsep yang memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan kemiskinan di daerah yang lain, dan kemiskinan waktu tertentu berbeda dengan kemiskinan waktu yang lain. Konsep kemiskinan diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Ukuran kelayakan ternyata dan terus berubah-ubah. Apa yang dianggap layak dalam komunitas tertentu boleh jadi tidak layak dalam komunitas tertentu.

c. Konsep kemiskinan subyektif Dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Kelompok yang menurut ukuran kita berada dibawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap diri sendirinya miskin dan demikian juga sebaliknya. Konsep ini lebih tepat digunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya.

4. Pemberdayaan

Sujianto (2009:147) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan dan

sasaran pembangunan, karena pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari masalah-masalah yang lebih besar yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh, yaitu masalah ketimpangan sektor, antar wilayah dan antar golongan penduduk.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh **Mardikanto dan Soebiato (2015:126)**, yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian.
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok.
- d. Memantau proses hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif.

Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai dan masyarakatnya. Oleh karena itu setiap pimpinan selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin yang baik. Seseorang pimpinan dikatakan efektif dalam kepemimpinannya jika para bawahannya berdisiplin baik.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang

ditemukan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi dan setting penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena betapapun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit untuk diteliti maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia. Sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka lokasi penelitian ini bertempat di kantor kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, data, dan informasi terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- 1) Camat sebagai pembina PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Siak Hulu
- 2) Unit Pengelola Kegiatan di kecamatan Siak Hulu
- 3) Masyarakat yang ikut berpartisipasi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tatacara atau tehnik pencarian data, baik yang berasal dari sumber atau objek penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

5. Analisis Data

Penelitian ini berfokus pada suatu objek penelitian tertentu dan mengalisanya sebagai kasus. Dalam mengalisa data, setelah informasi diperoleh melalui informan yang dianggap memiliki kapasitas untuk

memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis triangulasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dikecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang masalah yaitu bagaimana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Didalam pelaksanaan program PNPM Mandiri dibutuhkan adanya prinsip-prinsip manajemen yaitu melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dengan tujuan menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas. Namun dalam pelaksanaan PNPM Mandiri masih

kurang transparan dalam pendanaan dengan adanya standar operasional dalam pedoman PNPM Mandiri.

Agar lebih jelas mengenai PNPM Mandiri Perdesaan dalam penelitian ini, maka dilakukan perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan tepat. Selama 11 tahun PNPM Mandiri dilaksanakan di Kecamatan Siak Hulu telah diberikan berbagai macam bantuan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut adalah kegiatan fisik, kegiatan ekonomi dan kegiatan PKK (Peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat) dibawah ini merupakan gambar yang menunjukkan belum dilakukan pembangunan semenisasi jalan.

Dengan ini untuk mengatasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar peneliti menguraikan indikator, motivasi, peningkatan kesadaran dan kemampuan, sumber daya.

1. Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memenuhi nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warganegara dan anggota masyarakat. karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat didesa atau kelurahanya.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang menerima bantuan dengan melalui motivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan perbaikan wilayah mereka agar ikut berpartisipasi.

2. Sumber daya

Sumber daya manusia adalah seluruh potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, social, ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dengan segala potensi yang dimilikinya meliputi kualitas dan kuantitas. Tenaga kerja yang berkualitas berupa penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan tidak berjalan dengan baik, dimana dalam melakukan pengelolaan dibutuhkan sumber daya yang sesuai dan memiliki kemampuan dibidangnya sehingga setiap pekerjaan dapat selesai dengan waktu yang ditentukan.

a. Sumber daya anggaran

Dana Program Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber dari rupiah atau pinjaman / hibah.
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untuk mendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah.
- c. APBD Kabupaten atau Kota, sebagai dana pendamping ketentuan minimal 20% bagi kabupaten atau kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50% bagi kabupaten atau kota dengan kapasitas fiskal menengah keatas dari total BLM dikabupaten/kota.
- d. Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab

sosial perusahaan (coporate social responsibility).

- e. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan individu atau kelompok peduli lainnya).

b. Sumber daya kewenangan dan informasi

Sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa informasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pemberdayaan, terutama informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan pembangunan. selain itu informasi dari kerelaan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi pemberdayaan masyarakat miskin.

- c. Sumber daya alam

Berupa ciri-ciri umum keadaan alam (jenis dan sifat tanah, keadaan alam). Maupun hal-hal khusus yang sedang dihadapi (banjir, kekeringan dan bencana alam yang sering terjadi), maupun prakiraan dan kecendrungan-kecendrungan yang dapat diduga bakal terjadi selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Berdasarkan sumberdaya alam ini, perlu juga dicatat hal-hal yang menyangkut produktivitas potensial yang seharusnya dapat dicapai dan tingkat produktivitas yang sudah dapat dicapai.

d. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Kegiatan ini adalah proses memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemberdayaan, dengan melakukan pelatihan –pelatihan kepada masyarakat seperti program simpan pinjam pemberdayaan perempuan melalui kegiatan musyawarah desa khusus perempuan yang mana tidak mengizinkan pria ikut andil dalam bagian ini. Dimana kegiatan perempuan mengagaskan 2/3 dana dari PNPM Mandiri. Ini dilaksanakan karena

kaum perempuan juga dapat melakukan pendapat mereka. Bahwa segala sesuatu dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus melalui musyawarah, baik tingkat kelompok masyarakat, tingkat dusun, tingkat desa dan kecamatan. Musyawarah ditingkat seperti itu akan memunculkan sebuah pengerucutan masalah atau gagasan dari setiap masalah yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian dengan Camat kecamatan Siak Hulu memberikan pandangan yang sama bahwa masyarakat sangat menyambut antusias dengan adanya PNPM Mandiri.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan (MPd) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan ada beberapa yang ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi serta didukung oleh hasil wawancara dengan ketua Unit Pengelola Kegiatan di kecamatan Siak Hulu yaitu:

1. Sumber daya

a. Sumber daya manusia

Kualias dan kuantitas sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi program PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Siak Hulu. Dalam mewujudkan program yang berdaya guna untuk melaksanakan Program Pemberdayaan masyarakat miskin dibutuhkan sumber daya yang sesuai dan memiliki kemampuan dibidangnya sehingga pekerjaan dapat ditentukan dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam program PNPM Mandiri Perdesaan ada sebagian pengelolanya masih kurang secara

kuantitas dan kualitas, SDM Nya tidak sesuai dengan posisi jabatannya.

Hal ini dapat menyebabkan hal ini dapat menyebabkan program yang dilakukan tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini berdasarkan wawancara dengan ketua Unit Pengelola Kegiatan mengenai sumber daya manusia.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program PNPM Mandiri Perdesaan

Berdasarkan penelitian dilapangan banyak kelompok sasaran yang tidak mengerti dengan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap progeram PNPM Mandiri Perdesaan menyebabkan kurang maksimal. Dalam program PNPM Mandiri masyarakat diharapkan untuk aktif, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar aktif. Dalam program PNPM Mandiri Perdesaan kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat penting, karena kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan tidak maksimal.

4. Ketidak tepatan waktu dalam pelaksanaan

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan kurang lebih 1 tahun mulai dari sosialisasi, penggalan gagasan, perencanaan sampai pelaksanaan. Pelaksanaan itu dilakukan terhitung sejak pencairan dana dari rekening oleh penerima bantuan Program PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar waktu yang ditentukan tidak cukup serta faktor cuaca juga sangat mempengaruhi jika cuaca hujan maka semenisasi jalan, parit penuh dengan air

menyulitkan pembangunan drainase terhenti sementara serta adanya penyelewengan dana yang mengakibatkan proses tahapan ini mengalami keterlambatan waktu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dan peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ” maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan programnya belum efektif.

1. Pelaksanaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum efektif dikarenakan belum berjalan dengan optimal karena dalam pelaksanaan tidak tercapainya semua indikator yang telah ditentukan, sikap kurang kepedulian dari pihak PNPM Mandiri sebagai pelaksana program PNPM Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan program program PNPM Mandiri Perdesaan ini banyak kendala dalam peroses pengerjaannya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu :

a. Faktor sumber daya

➤ Sumber daya anggaran

Pendanaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, tanpa dana yang cukup dan memadai program program yang telah disusun sebaik apapun akan kesulitan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang

bersumber dari rupiah atau pinjaman / hibah.

- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untuk mendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah.
- c. APBD Kabupaten atau Kota, sebagai dana pendamping ketentuan minimal 20% bagi kabupaten atau kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50% bagi kabupaten atau kota dengan kapasitas fiskal menengah keatas dari total BLM dikabupaten/kota.
- d. Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (coporate social responsibility).
- e. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan individu atau kelompok peduli lainnya).

➤ Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi program PNPM Mandiri Perdesaan dikecamatan Siak Hulu. Dalam mewujudkan program yang berdaya guna untuk melaksanakan Program Pemberdayaan masyarakat miskin dibutuhkan sumber daya yang sesuai dan memiliki kemampuan dibidangnya sehingga pekerjaan dapat ditentukan dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam program PNPM Mandiri Perdesaan ada sebagian pengelolanya masih kurang secara kuantitas dan kualitas, SDM Nya tidak sesuai dengan posisi jabatannya. Hal ini dapat menyebabkan hal ini dapat menyebabkan program yang dilakukan tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini berdasarkan wawancara dengan ketua Unit Pengelola

Kegiatan mengenai sumber daya manusia.

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program PNPM Mandiri Perdesaan

Berdasarkan penelitian dilapangan banyak kelompok sasaran yang tidak mengerti dengan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap progeram PNPM Mandiri Perdesaan menyebabkan kurang maksimal. Dalam program PNPM Mandiri masyarakat diharapkan untuk aktif, namun kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum sadar aktif. Dalam program PNPM Mandiri Perdesaan kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat penting, karena kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan tidak maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka saran yang diberikan peneliti, yakni:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan memang harus dilanjutkan dan dipertahankan, karena memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun dari segi sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar kelompok sasaran mengerti maksud dan tujuan PNPM Mandiri perdesaan tersebut. Walaupun PNPM Mandiri sudah berakhir tahun 2015, namun dipemerintahan jokowi saat ini masih ada

program seperti PNPM Mandiri hanya berganti nama menjadi P3MD yaitu: Program Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Desa. Dimana pengelolaan dananya tidak dari UPK.melainkan dari masyarakat sendiri yang mengelola. Sedangkan Program PNPM Mandiri dana di kelola oleh UPK.

2. Diharapkan pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) harus mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang baik dari segi pengetahuan maupun komunikasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwas, M. Oos. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Global*. Alfabeta Bandung: Bandung.
- Badrudin. 2014. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Bagong, Suyanto. 2003. *Perangkap Kemiskinan. Problem dan Strategi Pengentasannya*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Gunung Agung: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Edisi 2*.BPFE: Yogyakarta.
- Indrajit, Wisnu dan Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan. Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Intrans Publishing
- Mardikanto, T. dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung: Bandung.
- Ndraha, Thaziduhu. 2003. *Kronologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Direksi Cipta: Jakarta.
- Prijono, Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi* CSIS:Jakarta.
- Rusli, Zaili dan As'ari, Hasim, 2010.*Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Cendikia Insani: Pekanbaru.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharto, E. 2005. *Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan*. Universitas indonesia: ui Perss: Jakarta
- Sujianto. 2009. *Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri. Studi Kajian di Kabupaten Pelelawan*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Sulistiyani,Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Gava Media: Yogyakarta.
- Sumaryadi, I,N, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama: Jakarta.
- Sumodinigrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan SosialKajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Kompas: Jakarta.
- Terry, G.R. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. PT.Renika Cipta: Jakarta.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wuryantono. 2005. *Komunikasi Pemberdayaan*. Bandung Transito

Yahya, Yohanes, 2006. *Pengantar Manajemen*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Zulkarnain. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Ardana Media: Yogyakarta.

Skripsi :

Amri, Adiando. 2014. *Pelaksanaan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) (Studi Kasus Kegiatan Ekonomi Bergulir)*.

Dipublikasikan. Program Studi administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Fitriani. 2014. *Evaluasi Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Persaan (PNPM) Bidang Sarana Dan Prasarana Didesa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Program Studi administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Dokumen:

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Nomor:

25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 4142/3717/PMD tanggal 5 November 2007 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.

Web:

<https://www.google.co.id/#q=koordinasi+penanggulangan+kemiskinan+no+25+kep+menko+kesra+VII+2007>

<https://www.google.co.id/#Upkpnpm surade.org.id> pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 21.23 WIB

<https://www.google.co.id/#q www.tnp2k.org.id> pada tanggal 6 Februari 2016 pukul 12.31 WIB

<http://laely-widjajati.blogspot.co.id/2012/04/peran-camat-dalam-pelaksanaan-pnpm.html> pada tanggal 15 juni 2016

<http://www.upk-pnpmsurade.org/ptopnpm/39-penjelasan-05-pelaku-pnpm-mp/106-badan-kerjasama-antar-desabkad.html> pada tanggal 15 juni 2016

<http://kamparkab.go.id/berita/siak-hulu/pnpm-lahirkan-lembaga-keuangan-desa.html> pada tanggal 15 juni 2016

<http://www.goriau.com/berita/riau/pnpm-mpd-riau-alokasikan-rp160-miliar-untuk-pembangunan-desa.html> pada tanggal 15 juni 2016